

Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik

Puji Laksono^{*1}

¹Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas Dakwah dan Ushuluddin
Institut KH. Abdul Chalim Mojokerto

Email : * Pujilaksono@ikhac.ac.id

Abstract

The process of mass communication is a reality experienced by society so that it will follow the ideology and political system adopted in the country where it lives. Every country has an ideology that is adhered to as values and principles that serve as guidelines in achieving national ideals. The ideology of a country ultimately determines the political system that is practiced in the life of the nation and state. People who live in a country must be guided by the ideology set. The state ideology becomes the values that are practiced and shared together in daily life, including in the process of mass communication. In the current political mass communication system it should have the potential to become the fourth power and pillar of democracy in a country's political system. Namely the mass media that play an important role as the fourth estate. The process of mass communication takes place in the flow of the country's political system, seen from the perspective of the Four Theories of the Press and Three Models of Media and Politics, democracy can develop according to the theory of libertarian theory and social responsibility in the four theories of the press, as well as liberal and corporate democracy in the three models of media and politics. Which is the important role of the mass media as the fourth estate can be realized. Whereas in a country that adheres to a media and political system according to authoritarian theory, the soviet communist theory and the pluralist pluralist model are not possible. Although the process of mass communication can play its role as the fourth estate in the realm of democracy, but there are serious challenges that must be faced, namely media conglomeration.

Keywords: *Mass communication, political system, democracy, press.*

Abstrak

Proses komunikasi massa merupakan suatu realitas yang dialami masyarakat sehingga ia akan mengikuti ideologi dan sistem politik yang dianut di negara di mana ia hidup. Setiap negara memiliki ideologi yang dianut sebagai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mencapai cita-cita nasional. Ideologi suatu negara pada akhirnya menentukan sistem politik yang dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang hidup di suatu negara harus berpedoman pada ideologi yang ditetapkan. Ideologi negara menjadi nilai-nilai yang dipraktikkan dan dihayati bersama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses komunikasi massa. Dalam arus sistem politik komunikasi massa seharusnya memiliki potensi untuk menjadi kekuatan keempat dan pilar demokrasi dalam sistem politik suatu negara. Yakni media massa yang memainkan peran pentingnya sebagai *the fourth estate*. Proses komunikasi massa berlangsung dalam arus sistem politik negara, dilihat dari perspektif *Four Theories of the Press* dan *Three Models of Media and Politics*, demokrasi dapat berkembang menurut teori *libertarian theory* dan *social responsibility* dalam *four theories of the press*, serta *liberal* dan *korporat demokratis* dalam *three models of media and politics*. Yang mana peran penting media massa sebagai *the fourth estate* dapat diwujudkan.

Sedangkan pada negara yang menganut sistem media dan politik menurut *authoritarian theory*, *the soviet communist theory* dan *model pluralis yang terpolariansi* tidak memungkinkan terwujud. Meski proses komunikasi massa yang dapat memainkan peranannya sebagai *the fourth estate* di alam demokrasi, namun ada tantangan berat yang harus dihadapi yakni konglomerasi media.

Kata Kunci : Komunikasi massa, sistem politik, demokrasi, pers.

A. Pendahuluan

Perkembangan komunikasi manusia dalam peradaban terus meningkat dari sistem penggunaan bahasa isyarat dan lambang, penggunaan sistem bahasa dan berbicara, penggunaan tulisan, hingga penggunaan media cetak dan elektronik. Perkembangan tersebut pada akhirnya membentuk tingkatan-tingkatan dalam berkomunikasi, yakni dari komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, hingga komunikasi massa.

Jay Black dan Frederick C mengemukakan bahwa komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal/tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. Luas di sini berarti lebih besar daripada sekedar kumpulan orang yang berdekatan secara fisik, sedangkan anonim berarti individu yang menerima pesan cenderung asing satu sama lain. Heterogen berarti pesan dikirim kepada orang-orang dari berbagai macam status, pekerjaan, dan jabatan dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain dan bukan penerima pesan yang homogen (Nurudin, 2016). Secara sederhana kita dapat memahami komunikasi massa sebagai proses komunikasi dari seseorang atau sekelompok orang melalui alat pengirim (media) kepada para khalayak atau pasar (Sobur, Alex, 2009). Dalam realitasnya komunikasi massa berkembang dari media cetak hingga elektronik. Termutakhir adalah berkembangnya internet yang memunculkan media komunikasi massa yang memiliki jangkauan maya.

Proses komunikasi massa merupakan suatu realitas yang dialami masyarakat sehingga ia akan mengikuti ideologi dan sistem politik yang dianut di negara di mana ia hidup. Negara menurut Max Weber merupakan institusi yang memegang monopoli kekuasaan (Plumer, 2011). Itu artinya negara adalah suatu organisasi yang memiliki wewenang yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk tujuan nasional bersama. Setiap negara memiliki ideologi yang dianut sebagai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mencapai cita-cita nasional. Ideologi suatu negara pada akhirnya menentukan sistem politik yang dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang hidup di suatu negara harus berpedoman pada ideologi yang ditetapkan. Ideologi negara menjadi nilai-nilai yang dipraktikkan dan dihayati bersama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses komunikasi massa.

Komunikasi massa yang dalam praktiknya diperankan oleh media massa, memiliki peran yang penting dalam perkembangan politik pada masyarakat modern saat ini. Media massa kerap kali disebut sebagai pilar demokrasi (Adam, 2000). Hal ini benar adanya ketika suatu negara menganut ideologi dan sistem politik demokrasi yang terbuka. Media akan memainkan perannya sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi konstitusional. Yang mana media massa menjadi media penyambung aspirasi masyarakat. Namun sebaliknya media akan kehilangan peran tersebut ketika suatu negara menganut sistem otoriter. Oleh karenanya tulisan ini mencoba memaparkan bagaimana proses komunikasi massa dan demokrasi, dalam ini lebih dipraktikkan oleh media massa yang hidup dalam berbagai arus ideologi dan politik di suatu negara.

Pemahaman demokrasi dalam tulisan ini mengacu pada pengertian demokrasi konstitusional yang dapat difahami sebagai gagasan pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah berdasarkan konstitusi; maka dari itu sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi (Budiarjo, 2013). Oleh karenanya karakter negara demokrasi berarti negara yang menganut sistem yang terbuka, memberi ruang kebebasan, dan munjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sebaliknya negara dalam karakter non-demokrasi akan mengabaikan hal-hal tersebut. Negara dengan sistem pemerintahan non-demokrasi akan menekankan kekuasaan terpusat pada pemimpin negara. Harapan tentang kebebasan individu adalah angan-angan utopis, mimpi yang tidak terwujud. Segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, kepercayaan dan lainnya ditentukan, diawasi, dan kontrol oleh negara. Sistem semacam ini berbanding terbalik dengan sistem demokrasi. Pemerintahan yang sah tidak diperoleh melalui pemilihan umum yang demokratis, biasanya dengan permainan politik elit, pemimpin sentral yang menentukan, atau jika ada pemilihan umum biasanya direayasa. Sistem pemerintahan bisa berbentuk Republik maupun Monarki. Kekuasaan menjadi acuan dan alat untuk menundukkan masyarakat. Dalam tataran praktik, semua aspek kehidupan bisa jadi dilakukan secara represif. Pemaksaan kuasa, dan pembungkaman suara-suara sumbang dengan ancaman sampai dengan kekerasan.

Dalam hal komunikasi, negara yang menganut sistem non-demokrasi ini cenderung menggunakan pendekatan komunikasi satu arah. Komunikasi yang berkebalikan yakni komunikasi dua arah yang mengedepankan diskusi, musyawarah mafakat, perdebatan, kritik, saling menanggapi, pengakuan hak asasi individu akan dihindari, dan ditekan. Jika mungkin dipraktikkan hanya sebatas simbolis yang tidak dihayati sepenuh hati. Segala kebenaran hanya datang dan ditentukan oleh negara. Berbagai gagasan, pemikiran, usul, inisiatif, dan pesan hanya tersampaikan melalui instruksi pimpinan tertinggi yang tidak bisa dibantah. Mereka akan mengarahkan, membina, memberi petunjuk, nasehat, wejangan suci yang haram diabaikan. Masyarakat cukup *sediko dawuh* menerima apa yang disampaikan oleh pemerintah, tidak ada ruang bagi ketidaksetujuan.

Media massa sebagai pelaku utama komunikasi massa pada negara dengan karakter non-demokrasi, mau tidak mau, suka tidak suka, pada akhirnya juga harus mengikuti arus ideologi yang ditetapkan negara tempat ia hidup. Dalam karakter negara semacam ini, maka teori pertama dalam *Four Theories of the Press* yakni teori pers otoriter (*authoritarian theory*) menjadi alat analisis yang sesuai. Menurut teori ini media massa dipegang, dikontrol, dan di bawah kendali langsung oleh pemerintah. Media massa berada pada posisi yang harus mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Kepemilikan media massa bisa milik pemerintah atau perorangan, tetapi semua harus di bawah kontrol langsung pemerintah. Media massa menjadi kepanjangan tangan pemerintah, sebagai alat propaganda pemerintah yang memberi pembenaran kepada negara mengenai segala persoalan yang sedang dihadapi dalam kehidupan. Ada atau tidak, hidup atau matinya suatu media massa semua tergantung perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sensor pemerintah menjadi alat untuk menyaring segala informasi yang akan dikeluarkan oleh media massa. Media massa turut serta dalam melanggengkan kekuasaan rezim.

Prinsip dasar dari teori pers otoritarian ini adalah bahwa negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada individu dalam skala nilai kehidupan sosial. Bagi seorang individu, hanya dengan menempatkan diri di bawah kekuasaan negara, maka individu yang bersangkutan bisa mencapai cita-citanya dan memiliki atribusi sebagai orang yang beradab. Penetapan tentang hal-hal “yang benar” dipercayakan hanya kepada segelintir “orang bijaksana” yang mampu memimpin. Pendekatan ini berpola atas bawah. Media massa harus mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdikan pada negara. Media massa diawasi melalui paten-paten, izin-izin terbit, dan sensor. Konsep ini menetapkan pola asli bagi sebagian besar

sistem-sistem media massa nasional dunia, dan masih bertahan hingga saat ini (Kusumaningrat&Kusumaningrat, 2007).

Teori pers otoriter (*authoritarian theory*) ini kemudian berkembang dan dimodifikasi oleh negara yang menganut ideologi komunisme. Negara komunisme dalam perjalanan bernegara untuk mencapai tujuannya, menciptakan sistem komunikasi massa tersendiri. Yang pada akhirnya memunculkan teori pers komunis Soviet (*The Soviet Communist Theory*) dalam *Four Theories of the Press*. Jika teori pers otoriter tidak harus dianut oleh negara dengan sistem komunisme, maka teori pers komunis Soviet hanya dianut oleh negara dengan sistem pemerintahan komunis. Teori ini lahir dan berkembang di negara Uni Soviet sekitar dua tahun setelah Revolusi Oktober 1917, negara induk tempat ideologi komunisme menjadi dewa yang harus dipuja. Yang membedakan teori pers Soviet dengan teori pers otoriter ialah (1) teori pers otoriter menekankan pada tujuan utama melanggengkan *status quo*, sedangkan pada negara komunis tujuan utamanya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat untuk mencapai tahap masyarakat komunis. (2) motif profit media massa dihilangkan. (3) semua informasi pada media massa adalah atas kehendak pemerintah komunis, dan cenderung mensortir isu-isu yang sedang ramai di masyarakat.

Media massa di negara yang menganut komunisme menjadikan media massa sebagai alat dan bagian integral negara, menjadi salah satu organ dari partai komunis yang berkuasa. Segala sesuatu dalam proses komunikasi massa melalui media massa ditentukan oleh partai komunis. Media massa menjadi *collective propangandist*. Alat di mana penguasa komunis melancarkan propaganda dan agitasi. Fungsi media massa adalah sebagai indoktrinasi masyarakat dan bimbingan kehidupan yang dikendalikan oleh pemerintah komunis. Jika pada negara yang menganut pers otoriter, keberadaan dan kepemilikan media massa bisa bervariasi, maka di negara komunis media massa hanya milik pemerintah yang berkuasa. Media massa bukan milik pribadi seseorang. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, maka teori pers Soviet ini saat ini dianut oleh negara-negara yang masih bertahan dengan ideologi komunis, seperti Republik Rakyat China dan Korea Utara.

Proses komunikasi massa dalam sistem ideologi negara non-demokrasi semacam ini mengalami hambatan struktural untuk berjalan alami. Media massa mengalami disfungsi sebagai *the fourth estate* dalam suatu kehidupan bernegara. Mungkin media massa sudah melaksanakan tugas sucinya untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan kepada masyarakat. Namun ia mengingkari tugas suci lainnya yakni sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Informasi, pendidikan, dan hiburan disampaikan menurut instruksi dari rezim yang berkuasa. Jika melakukan fungsi kontrolpun, media melakukan fungsi kontrol masyarakat untuk kepentingan penguasa. Sedangkan fungsi kontrol terhadap pemerintah untuk kepentingan masyarakat tidak dilaksanakan/tidak dapat dilaksanakan. Sehingga aspirasi kritis masyarakat kepada pemerintah tidak tersampaikan. Kehidupan hanya digambarkan baik-baik saja, keberhasilan pemerintah, kemuliaan dan keagungan pemimpin, dan kebesaran negara menjadi suguhan sehari-hari media massa. Tidak ada nada minor, narasi kehidupan yang menyedihkan, kegagalan pemerintah, keburukan pemimpin, dan ketidaksejahteraan masyarakat.

Jika negara yang kita bahas sebelumnya cenderung menekankan kekuasaan yang terpusat pada pemimpin atau pemerintah, posisi individu yang kerdil, sehingga proses komunikasi massa hanya terjadi satu arah. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang proses komunikasi di negara yang menganut ideologi demokrasi. Sistem demokrasi lebih menekankan pada kebebasan individu. Di mana individu menjadi leluasa terhadap hak-hak asasi mereka. Pemerintahan yang sah diperoleh melalui keterbukaan dengan pelaksanaan pemilu yang terbuka. Legalitas kekuasaan diperoleh melalui mandat rakyat. Pemerintah tunduk pada pembatasan-pembatasan kekuasaan dengan adanya konstitusi. Kemerdekaan individu sebagai warga negara dijamin oleh konstitusi. Segala keputusan mayoritas baik

secara langsung maupun tidak langsung menjadi penentu sebagian besar kebijakan pemerintah. Dalam kondisi pemerintahan yang menganut demokrasi ini posisi individu dalam masyarakat berada pada tingkat kebebasan dan individualisme yang tinggi. Sehingga tingkat penyalahgunaan terhadap kekuasaan oleh pemerintah menjadi berkurang. Di negara yang menganut demokrasi dengan pengakuan terhadap kebebasan individu, maka komunikasi berjalan dua arah. Tidak seperti di negara otoriter dan komunis yang menutup kemungkinan untuk menanggapi pemerintah, di negara yang menganut demokrasi masyarakat dapat menanggapi pemerintah. Manusia dipandang sebagai makhluk bebas yang mengedepankan akal sehat dalam menghadapi masalah. Dengan demikian manusia dipandang sebagai makhluk yang mampu membedakan mana yang benar mana yang tidak. Kebebasan merupakan hal yang mendasar yang harus dibela, sehingga kontrol represif pemerintah dianggap sebagai pemerkosaan terhadap kebebasan individu. Keterbukaan, dialog, kritik, dan adu argumen merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat di negara yang menganut demokrasi. Dengan kondisi seperti ini proses komunikasi di negara yang menganut demokrasi liberal berjalan juga berjalan bebas.

Media massa sebagai kanal utama dalam komunikasi massa di negara yang menganut sistem demokrasi, berada pada posisi mitra bagi masyarakat. Dalam posisi semacam ini media massa hanya menggulirkan isu-isu yang kemudian sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Media massa berada diberi kebebasan yang luas untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran akan diperoleh jika media massa diberi kebebasan yang akan menjadi tolak ukur ditempatkannya hak bebas manusia pada posisi yang terhormat. Dengan karakter negara dengan ideologi ini, maka *Four Theories of the Press* yakni teori pers bebas (*libertarian theory*) menjadi alat analisis yang sesuai.

Oleh karena itulah, penelitian ini diadakan untuk menjawab bagaimanakah komunikasi melalui media massa mampu membangun arus politik di negara yang beragam seperti Indonesia? Apakah kekuatan-kekuatan yang terdapat di negara demokrasi dapat menjamin tersedianya public sphere dalam negara yang beragam melalui komunikasi bermedia?

Teori pers bebas mencapai puncaknya pada abad ke-19. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Sehingga media massa harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran, dan bukan sebagai alat kebenaran. Dalam upaya mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap. Menurut John Milton Proses menemukan kebenaran (*self-righting process*) dan kebebasan menjual gagasan (*free market of ideas*) menjadi hal yang sentral. Dua hal ini yang akan mengontrol media massa, dan pengadilan. Implikasi dari proses menemukan kebenaran ini adalah bahwa semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama ke semua saluran komunikasi dan setiap orang punya akses yang sama pula ke sana (Kusumaningrat&Kusumaningrat, 2007).

Teori pers bebas memang paling banyak memberikan landasan kebebasan yang tak terbatas pada media massa. Oleh karena itu lebih banyak memberikan informasi, paling banyak memberikan hiburan, dan paling banyak terjual tirasnya (Kusumaningrat, 2007). Namun karena keberadaan media massa berada di tangan pemilik modal, maka orientasi keberadaan media massa lebih kepada upaya pengumpulan keuntungan atau laba. Media massa menjadi alat bagi para pemilik modal sebagai alat produksi kapitalis. Kontrol terhadap media massa berada di tangan pemilik modal melalui mekanisme pasar melalui *rating* dan iklan demi kepentingan pemupukan keuntungan dan laba. Aturan-aturan yang diciptakan untuk media massa yang ada hanyalah untuk menciptakan keuntungan berupa materi bagi pemilik modal media massa tersebut.

Teori pers bertanggungjawab menekankan pada asumsi bahwa sebebaskan-bebasnya media massa, media massa harus bertanggungjawab kepada khalayak mengenai apa yang

diaktualisasikan. Penekanan terhadap tanggungjawab sosial menjadi penting demi menghindari terjadinya gangguan terhadap sistem sosial. Media massa berada pada posisi sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang menjamin kesetaraan akses semua pihak untuk mengaktualisasikan diri lewat media massa. Dengan demikian setiap orang yang mempunyai hal yang penting untuk diaktualisasikan harus diberikan hak dalam forum, dan jika media massa dianggap tidak memenuhi kewajibannya, maka harus ada pihak yang harus memaksanya. Media massa dikontrol oleh opini khalayak, kecenderungan konsumen, dan etika profesional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini, desain yang akan digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu mengenai keadaan ataupun gejala yang terjadi. Selanjutnya penulis menggunakan metode purposive dan snowball dalam memilih informan. Dengan melihat berbagai pendekatan dalam beberapa model teori komunikasi massa pada khalayak melalui *freedom of the press, freedom of the opinion and social responsibility of the media*.

Peneliti selanjutnya melakukan analisis perbandingan dan menyajikan data serta berusaha untuk menginterpretasikan data-data tersebut dengan mengeliminasi berbagai distorsi informasi yang kemungkinan terjadi.

C. Pembahasan

Dari uraian tentang proses komunikasi massa yang berjalan menurut arus sistem politik yang dianut oleh negara non-demokrasi dengan negara demokrasi tersebut. Maka kita dapat mengetahui secara praksis empat teori pers yaitu *Four Theories of the Press* yang dikemukakan oleh tiga guru besar ilmu komunikasi Universitas Illinois yakni Siebert, Peterson, dan Schramm. *Pertama*, Teori Otoriter (*authoritarian theory*) dengan asumsi dasar bahwa media massa dipegang, dikontrol, dan di bawah kendali langsung oleh pemerintah. Media massa berada pada posisi yang harus mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah. *Kedua*, teori libertarian (*libertarian theory*) dengan asumsi bahwa manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Sehingga media massa harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran, dan bukan sebagai alat kebenaran. *Ketiga*, teori teori pers bertanggungjawab (*social responsibility*) dengan asumsi bahwa sebebaskan-bebasnya media massa, media massa harus bertanggungjawab kepada khalayak mengenai apa yang diaktualisasikan. Penekanan terhadap tanggungjawab sosial menjadi penting demi menghindari terjadinya gangguan terhadap sistem sosial. *Keempat*, teori pers komunis Soviet (*The Soviet Communist Theory*) dengan asumsi media massa sebagai alat dan bagian integral negara, menjadi salah satu organ dari partai komunis yang berkuasa. Segala sesuatu dalam proses komunikasi massa melalui media massa ditentukan oleh partai komunis. Empat teori pers tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Perbandingan *Four Theories of the Press*

	Otoritarian	Liberal	Tanggung Jawab Sosial	Soviet-Komunis
Posisi media	Alat propaganda pemerintah	Alat produksi kapitalis	Alat pemberdayaan masyarakat	Alat dan bagian integral negara
Fungsi Media Massa	Memberi pembenaran kepada negara tentang berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan Masyarakat	Pengumpul keuntungan/laba	Menjamin kesetaraan akses semua pihak untuk berbicara lewat media.	Melancarkan propaganda dan agitasi
Penentu Keberadaan Media Massa	Di tangan pemerintah	Di tangan pemodal besar	Di tangan masyarakat	Di tangan pemerintah dan partai komunis
Kontrol terhadap Media Massa	Di tangan pemerintah melalui mekanisme sensor	Di tangan pemodal melalui mekanisme pasar (<i>rating</i> dan iklan)	Opini masyarakat, Kecenderungan konsumen, dan etika profesional	Di tangan pemerintah melalui monopoli langsung
Kepentingan	Melanggengkan kekuasaan	Penumpukan Keuntungan/laba	Memberdayakan Masyarakat	Indoktrinasi, untuk mencapai tahap masyarakat komunis

Three Models of Media and Politics

Four Theories of the Press yang menjadi pisau analisis bagaimana arus komunikasi massa di negara demokrasi dan non demokrasi mendapatkan kritik karena dianggap usang. Selangkah lebih jauh dari teori tersebut, muncullah gagasan tipologi baru hubungan antara media dan politik berdasarkan analisis komparatif terhadap sistem. Gagasan baru tersebut muncul dari Daniel C. Hallin dan Paolo Manchi (2004). Mereka kemudian menawarkan model baru dalam menganalisis komunikasi massa dalam arus sistem politik suatu negara. Model yang mereka tawarkan adalah *Three Models of Media and Politics* (Mq Quail, 2011). Untuk memahami model tersebut mari kita perhatikan tabel di bawah ini :

Tabel 2. Three Models of Media and Politics

Model \ Aspek	Liberal	Korporat Demokratis	Pluralis yang Terpolarisasi
Peran negara terhadap media	Lemah	Kuat (Sejahtera)	Kuat
Konsensus atau polarisasi politik	Campuran	Lebih banyak konsensus	Lebih terpolarisasi
Profesionalisasi Jurnalisme	Rendah	Tinggi	Sedang
Paralelisme pers-politik	Rendah	Sedang	Tinggi
Keberadaan clientelisme	Rendah	Rendah	Tinggi

Tabel di atas menunjukkan pada bagian atas merupakan model yang dibuat oleh Hallin dan Manchi. Model pertama adalah *Liberal*, yang merupakan hasil penelitian dari negara-negara Atlantik Utara, meliputi Inggris, Amerika Serikat, Irlandia, dan Kanada. Model kedua adalah *Korporat demokratis*, yang merupakan hasil penelitian dari negara-negara Eropa Utara, meliputi Austria, Belgia, Finlandia, Denmark, Norwegia, Jerman, Belanda, Swedia, dan Swiss. Model ketiga adalah *Pluralis yang terpolarisasi*, yang merupakan hasil penelitian dari negara-negara Mediteranian, meliputi Italia, Perancis, Yunani, Spanyol, dan Portugal. Selanjutnya pada bagian samping kiri merupakan aspek yang diamati dari tiga model tersebut. Aspek pertama adalah *peran negara terhadap media*, yakni aspek di mana negara hadir dengan kekuatan sistem politiknya dalam membentuk fungsi dan struktur media. Aspek ini melihat seberapa tinggi atau rendah intervensi negara terhadap media, seperti sensor, subsidi ekonomi negara kepada media, kepemilikan media, regulasi media, negara sebagai sumber informasi. Aspek kedua adalah *konsensus atau polarisasi politik*, yakni aspek di mana perbedaan kekuatan-kekuatan politik dan kesepakatan bersama tersebut berdampak pada media. Aspek ketiga adalah *Profesionalisasi jurnalisme*, yakni aspek yang mengacu pada seberapa tinggi atau rendah profesionalitas, independensi media dapat dikembangkan. Aspek keempat adalah *Paralelisme antara media dan politik*, yakni mengacu pada orientasi politik media dan keberadaan media yang cenderung menjadi terstruktur dan berjarak menurut partai-partai dan ideologi yang saling bersaing di dalam suatu negara. Aspek kelima adalah *Keberadaan clientelisme*, yakni media dimasuki kepentingan luar dan bekerja untuk tujuan tersebut secara sukarela atau demi uang, sehingga menjauh dari norma-norma perilaku legal-rasional.

Lebih lanjut, rincian dari *Three Models of Media and Politics* adalah sebagai berikut :

1. Model Liberal

Model liberal jika dilihat dari aspek peran negara memiliki tingkat yang rendah. Artinya campur tangan negara terhadap proses komunikasi massa dengan media sangat minim, karena orientasi sistem media massa lebih ditekankan pada kepentingan pasar atau komersialisasi media. Peraturan yang dibuat pemerintah lebih mengarah ke liberalisasi dan kesejahteraan pekerja media. Hal ini terjadi karena sistem politik di negara dengan model ini berakar dari demokrasi pluralisme moderat. Dilihat aspek konsensus dan polarisasi politik menunjukkan tingkat dominasi mayoritas yang tinggi. Konsensus dibuat oleh pemerintah berdasarkan suara mayoritas. Dilihat dari aspek profesionalisasi jurnalisme menunjukkan tingkat yang rendah. Hal ini karena tidak memiliki lembaga yang kuat dan tidak ada regulasi diri yang kuat dari pelaku media. Dilihat dari paralelisme antara media dan politik juga menunjukkan tingkat yang rendah. Hal ini karena media dianggap sebagai komersial yang netral, informasi yang diberikan media berorientasi pada pluralisme internal. Dari aspek keberadaan clientelisme juga cenderung rendah, karena lebih mengutamakan representasi individu dari pada pluralisme organisasi.

2. Model Korporat Demokratis

Model korporat demokratis jika dilihat dari aspek peran negara memiliki tingkat yang kuat. Artinya campur tangan negara dalam proses komunikasi massa dengan media sangat signifikan dalam hal-hal yang dianggap vital. Pemerintah membuat peraturan sistem media yang sangat ketat, meski demikian kebebasan media juga mendapatkan perlindungan dari negara. Peraturan negara dibuat untuk kepentingan kesejahteraan negara. Hal ini terjadi karena sistem politik di negara dengan model ini berakar dari demokrasi pluralisme moderat. Dilihat dari aspek konsensus dan polarisasi politik masih mengacu pada kesepakatan bersama yang dianggap baik. Dilihat dari aspek profesionalisasi jurnalisme memiliki tingkat yang tinggi hal ini karena memiliki lembaga pers yang kuat serta regulasi diri yang kuat dari pelaku media. Dari aspek paralelisme antara media dan politik menunjukkan tingkat yang sedang. Media dianggap sebagai refleksi dari partai yang berkuasa, meski demikian juga terjadi pergeseran yang mengarah pada komersialisasi media yang netral. Dari aspek keberadaan clientelisme memiliki tingkat yang rendah. Hal ini karena terbentuknya korporasi demokrasi dan tersegmentasi.

3. Model Pluralis yang Terpolarisasi

Model pluralis yang terpolarisasi dilihat dari aspek peran negara memiliki tingkat yang kuat. Artinya campur tangan negara dalam proses komunikasi sangat signifikan. Negara dalam model ini memiliki sejarah terbentuk dari pola konflik dan konsensus, sehingga tidak ada demokratisasi. Peraturan pemerintah dibuat sangat ketat untuk membatasi media dengan sensor terhadap informasi yang akan disampaikan. Dilihat dari aspek konsensus dan polarisasi politik menunjukkan terpolarisasinya dengan konsensus yang baik. Dilihat dari aspek profesionalisasi jurnalisme memiliki tingkat yang sedang. Hal ini karena tingkat profesionalitas media masih kurang profesional, bahkan bisa dibilang sangat tidak profesional. Dilihat dari aspek paralelisme antara media sangat tinggi. Hal ini karena media yang ada dikondisikan untuk kepentingan pemerintah yang berkuasa. Orientasi media ditujukan untuk kepentingan elit politik. Sehingga hal ini berdampak pada aspek keberadaan clientelisme memiliki tingkat yang tinggi.

The Fourth Estate

Setelah membahas tentang komunikasi massa dalam arus sistem politik dengan memaparkan teori-teori sistem media. Selanjutnya kita akan membahas tentang *the fourth estate* atau media memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ke empat, dan pilar demokrasi dalam sistem politik suatu negara. Istilah *the fourth estate* dikemukakan oleh Edmund Burke di Inggris pada akhir abad ke 18. Istilah ini merujuk pada kekuasaan politik yang dimiliki oleh media massa, setara dengan ketiga pilar lain dalam kehidupan politik suatu negara (McQuail, 2002). Ketiga pilar tersebut merupakan pengejawantahan dari prinsip sistem politik yang demokratis yakni *trias politica*. Prinsip sistem politik ini membagi sistem kekuasaan untuk perimbangan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sistem tersebut memang dapat mendukung proses demokratisasi dengan adanya saling mengawasi dan keberimbangan, untuk menghindari monopoli kekuasaan pada kelompok elit politik tertentu. Namun dalam praktiknya ketiga pilar tersebut terkadang kurang membawa aspirasi masyarakat. Hingga akhirnya dibutuhkanlah pilar yang di luar sistem tersebut untuk menjadi *watcdog*. Di sinilah potensi penting media massa untuk menjadi kekuasaan keempat (*the fourth estate*) yang mengawasi negara agar tidak melenceng dari cita-cita negara, serta membawa aspirasi masyarakat.

McQuail (2002) menyebutkan isu-isu utama dalam teori sosial media. Salah satu isu krusial tersebut adalah dukungan kepada proses demokratisasi. Media massa diharapkan memiliki kontribusi utama terhadap kinerja lembaga politik dan sosial lainnya. Kontribusi ini dibuat melalui penyiaran yang utuh, adil, dan dapat diandalkan mengenai masalah publik, membantu mengungkapkan sudut pandang yang beragam, memberikan akses bagi banyak suara di masyarakat, memfasilitasi partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial dan politik, dan seterusnya (Mc Quail, 2002). Oleh karenanya posisi media massa sebagai *the fourth estate* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dibutuhkan.

Mengacu pada teori sistem media, maka media bisa menjadi *the fourth estate* jika sistem politik negara adalah sistem demokratis. Dengan iklim demokrasi yang berkembang dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari, maka media massa bisa memainkan peranannya sebagai *the fourth estate*. Oleh karenanya pada negara dengan sistem media dan politik menurut teori *libertarian theory* dan *social responsibility* dalam *four theories of the press*, serta *liberal* dan *korporat demokratis* dalam *three models of media and politics* saja yang bisa mewujudkan *the fourth estate*, meski dengan kadar kebebasan yang berbeda. Selebihnya dari teori-teori sisanya *authoritarian theory*, *The soviet communist theory* dan *model pluralis yang terpolariasi* tidak memungkinkan terwujud karena monopoli dan kontrol media massa oleh negara. Namun di sisi lain media massa juga bisa menjadi kekuatan untuk menumbangkan sistem politik yang mengekang, dan menghembuskan angin demokratisasi.

Peran media massa sebagai *the fourth estate* dari teori-teori di atas yang memungkinkan secara praktis memang akan berbeda, terutama kadar kebebasannya. Namun secara moral media massa sebagai *the fourth estate* harus mampu mengembah amanah untuk kepentingan masyarakat, dengan kriteria kebebasan publikasi, pluraritas kepemilikan, jangkauan yang luas, dan keberagaman konten. Dari konten informasi, harus memperhatikan keberagaman informasi, mendukung tatanan publik dan hukum, informasi dan budaya yang berkualitas tinggi, mendukung sistem politik demokratis, menghormati hak asasi manusia, tidak membahayakan masyarakat dan individu. Secara profesional harus menyebarkan informasi secara jujur, akurat, berimbang, objektif, dan relevan.

Kondisi kehidupan yang merengkuh kebebasan yang luas, menjadikan media massa di negara demokrasi dapat memainkan peran sebagai *the fourth estate* dalam suatu kehidupan bernegara. Tiga pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi dengan menggunakan prinsip *trias politica*, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, maka media massa dapat menjadi kekuatan kekuasaan keempat. Media massa dapat memainkan

peran tersebut dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga negara. Media massa oleh karenanya harus bebas dari campur tangan penguasa. Media massa menjadi penyeimbang kekuasaan. Di sinilah media massa menjadi alat untuk menemukan kebenaran, yang mana semua gagasan memiliki kesempatan yang sama ke semua saluran komunikasi dan setiap orang punya akses yang sama.

Peran media massa sebagai *the fourth estate* dalam praktiknya tidaklah mudah. Meski media tersebut hidup di alam demokrasi. Munculnya konglomerasi media menjadi suatu keraguan akan konsistensi tugas luhur media tersebut. Kepemilikan beberapa media yang terkonsentrasi pada satu elite tertentu, dan membentuk oligarki media seringkali dijadikan alat politik oleh para elit politik untuk mencapai ambisinya. Oligarki-oligarki media yang terkooptasi oleh elit politik dapat mengancam tugas luhur media sebagai pengemban kepentingan publik. Ross Tapsell (2019) dalam penelitiannya terhadap media massa di Indonesia menyimpulkan bahwa menguatnya konglomerasi, kekuasaan para pemilik media, serta cara pengelolaan perusahaan yang semakin menyerupai dinasti telah memperparah pemberitaan yang semakin partisan. Kondisi ini memiliki dampak signifikan terhadap lanskap media yang seharusnya beragam, tidak memihak, dan informatif di salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (Tapsel, 2019). Kasus seperti ini salah satunya terlihat dalam rangkaian dukungan terhadap calon presiden, Abu Rizal Bakrie pemilik Bakrie Group mendukung Prabowo, dan Surya Paloh pemilik Media Group mendukung Joko Widodo. Yang tentunya diikuti oleh dukungan alat-alat media yang mereka miliki. Terlebih lagi kedua pemilik media tersebut tidak hanya pemilik media tetapi juga politikus yang terlibat secara langsung dalam politik praktis. Serta merapatnya media-media lain ke dalam gerbong dukungan politik kedua belah pihak. Dari realitas ini terungkap bahwa esensi media yang paling prinsipil tercerambik di antara kepentingan ekonomi maupun politik dari elit media dan politik.

D. Penutup

Proses komunikasi massa akan selalu mengikuti pusaran arus ideologi dan sistem politik dimana ia hidup. Ada dua perspektif teori pers yang menganalisis realitas tersebut yakni *four theories of the press* dan *three Models of Media and Politics*. Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi massa memiliki peran suci dalam mewujudkan demokrasi jika berkembang pada negara dengan sistem media dan politik menurut teori *libertarian theory* dan *social responsibility* dalam *four theories of the press*, serta *liberal* dan *korporat demokratis* dalam *three models of media and politics* saja yang bisa mewujudkan *the fourth estate*. Sedangkan pada negara yang menganut sistem media dan politik menurut *authoritarian theory*, *the soviet communist theory* dan *model pluralis yang terpolariansi* tidak memungkinkan terwujud karena monopoli dan kontrol media massa oleh negara. Meski proses komunikasi massa hidup di alam demokrasi dan dapat mendorong terwujudnya demokrasi, masih terdapat tantangan. Munculnya konglomerasi media di negara demokrasi, menjadi tantangan tersendiri bagi peran media massa sebagai *the fourth estate*. Munculnya konglomerasi media menjadi suatu keraguan akan konsistensi tugas luhur media tersebut. Kepemilikan beberapa media yang terkonsentrasi pada satu elite tertentu, dan membentuk oligarki media seringkali dijadikan alat politik oleh para elit politik untuk mencapai ambisinya. Oligarki-oligarki media yang terkooptasi oleh elit politik dapat mengancam tugas luhur media sebagai pengemban kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Rainer. 2000. *Media dan Politik*, dalam Mirza, Layla S. (ed). *Politik dan Radio : Buku Pegangan bagi Jurnalis Radio*. Fredrich Nauman Stiftung.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. 2007. *Jurnalistik : Teori dan Praktik*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- McQuail, Denis. 2002. *McQuail's Mass Communication Theory*. London : Sage Publication.
- . 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Edisi 6 Buku 1. 2011. Jakarta : Salemba Humaika.
- . 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Edisi 6 Buku 2. 2011. Jakarta : Salemba Humaika.
- Morissan. 2015. *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*. Jakarta Prenadamedia Group.
- Nurudin. 2016. *Ilmu Komunikasi : Ilmiah dan Populer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Plumer, Ken. 2011. *Sosiologi : the basics*. Terj. Nanang Martono dan Sisworo. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sobur, Alex. 2009. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Tapsell, Ross. 2019. *Kuasa Media di Indonesia : Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Serpong : CV. Marjin Kiri.